



## ANALISIS KINERJA GCG (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA(BUMN) PT ANTAM

Yudha Dwi Saputro<sup>1</sup>, Dhiya fahriyyah Maritza<sup>2</sup>, Achmad Zaidan Rafisyah<sup>3</sup>, Rafel Lina<sup>4</sup>, Fajar Reza Rivaldi<sup>5</sup>, Ramdihar Nanda Edniko Pratama<sup>6</sup>, Rafa Afri Ananda<sup>7</sup>, Saila mahfira<sup>8</sup>

<sup>12345678</sup> Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: [yudhaoke24@gmail.com](mailto:yudhaoke24@gmail.com)<sup>1</sup>, [dhiyafahriyyah@gmail.com](mailto:dhiyafahriyyah@gmail.com)<sup>2</sup>, [zzaidan851@gmail.com](mailto:zzaidan851@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[raffellina2626@gmail.com](mailto:raffellina2626@gmail.com)<sup>4</sup>, [fajarrezarvld2@gmail.com](mailto:fajarrezarvld2@gmail.com)<sup>5</sup>, [ramdihar22@gmail.com](mailto:ramdihar22@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[rafaafri3@gmail.com](mailto:rafaafri3@gmail.com)<sup>7</sup>, [mahfirasaila@gmail.com](mailto:mahfirasaila@gmail.com)<sup>8</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan, khususnya di PT Aneka Tambang (ANTAM). GCG, sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, melibatkan mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi secara konsisten dapat meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi GCG di ANTAM, termasuk sistem pelaporan pelanggaran dan transparansi informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Selain itu, komitmen ANTAM terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia juga berkontribusi pada keberlanjutan kinerja perusahaan.

**.Kata Kunci:** *Good Corporate Governance (GCG); Kinerja Perusahaan; Transparansi; Akuntabilitas; Tanggung Jawab*

### Abstract

This study aims to evaluate the implementation of good corporate governance (GCG) principles and its impact on company performance, especially at PT Aneka Tambang (ANTAM). GCG, as a system that regulates and controls the company, involves a mechanism of relationships between various parties involved in managing the company. This research uses a qualitative-descriptive method with data collected through literature studies. The results showed that consistent implementation of principles such as transparency, accountability, responsibility, fairness, and independence can improve company performance, protect the interests of stakeholders, and ensure compliance with regulations. The implementation of GCG in ANTAM, including the whistleblowing system and transparency of financial information, strengthens the company's accountability and transparency. In addition, ANTAM's commitment to social and environmental responsibility and human resource development also contributes to the sustainability of the company's performance.

**Keywords:** *Good Corporate Governance (GCG); Company Performance; Transparency; Accountability; Responsibility*

## PENDAHULUAN

Menurut Herliansyah (2012), sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi. Industri ini memerlukan investasi yang sangat besar, bersifat jangka panjang, penuh risiko, dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, menjadikan pendanaan sebagai isu krusial dalam pengembangan sektor ini.

PT. Aneka Tambang, Tbk, yang sering dikenal sebagai ANTAM, adalah perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal, dengan orientasi ekspor. Aktivitas ANTAM meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan penjualan bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara di seluruh Indonesia. ANTAM memiliki basis pelanggan yang loyal di Eropa dan Asia. Oleh karena itu, pemantauan yang cermat dan optimal diperlukan untuk memastikan stabilitas posisi keuangan perusahaan dan pencapaian kinerja terbaiknya. Kinerja perusahaan diukur dari keuntungan yang diperoleh melalui penjualan, aset, dan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan tersebut (Roosdiana, 2020). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance (GCG), menjadi esensial.

GCG sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan mencakup mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola perusahaan (definisi keras) dan nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme tersebut (definisi lunak). GCG menyediakan struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran perusahaan serta teknik monitoring kinerja. Implementasi GCG diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Proses penerapan GCG melibatkan langkah panjang dalam mengimplementasikan prinsip-prinsipnya, menanamkan nilai-nilai yang membentuk budaya tata kelola perusahaan. Perusahaan berusaha mencapai tujuan yang direncanakan, memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan, dan mempertahankan kelangsungan hidup (Sari, 2021).

Menurut Agustin Wulandari (2019), lima prinsip utama GCG adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi. Dengan berkembangnya GCG, pentingnya tata kelola ini sebagai alat manajemen bisnis untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan bisnis yang sehat semakin diakui. Dalam praktiknya, GCG mengelola hubungan antara manajemen, komisaris, direktur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya melalui kerangka kerja yang menetapkan tujuan perusahaan dan cara mencapainya serta memantau kinerja yang dihasilkan. Praktik GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi risiko yang diambil oleh dewan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepercayaan publik dan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam investasi modalnya (Irawati, Delta, dan Sutarjo, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan, bagaimana transparansi informasi dan akuntabilitas dalam praktik GCG mempengaruhi kinerja perusahaan, serta dampak GCG dalam manajemen risiko perusahaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data dideskripsikan dan diinterpretasikan melalui studi literatur, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan data yang diharapkan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, catatan, dan laporan mengenai temuan investigasi sebelumnya. Habib (1993) menyatakan bahwa studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah kembali sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik tertentu untuk menghasilkan informasi baru atau memperluas pemahaman yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Memengaruhi Kinerja Perusahaan di Sektor Tertentu.

Sistem manajemen perusahaan yang dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG) dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnis, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip yang berlaku. GCG didasarkan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, pelanggan, dan masyarakat umum.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menetapkan aturan penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 48/2017 juga mengatur penilaian kinerja perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang mencakup aspek keuangan, operasional, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 mengatur penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara keseluruhan, termasuk sistem pengendalian internal dan struktur organisasi. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku yang diterbitkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Peraturan ini juga mencakup sanksi bagi perusahaan yang gagal menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong penerapan Prinsip-prinsip GCG sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan Prinsip-prinsip GCG merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja, kepercayaan, nilai dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, penerapan implmentasi prinsip – prinsip GCG dalam PT. Aneka Tambang (Antam), sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi yang tercantum dalam Pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002 menyatakan bahwa transparansi adalah kondisi di mana kejelasan dilakukan secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi penting serta relevan mengenai perusahaan. Prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG) mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk kreditur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman utama transparansi adalah menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun transparansi diterapkan, ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sesuai dengan peraturan hukum, termasuk informasi rahasia jabatan dan hak individu. Kebijakan perusahaan juga harus didokumentasikan dan disampaikan dengan wajar kepada pemangku kepentingan. Untuk mematuhi prinsip transparansi, ANTAM secara berkala dan rutin memberikan laporan informasi dan fakta material kepada publik. Keterbukaan informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi. ANTAM mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau

Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia (IDX) No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dalam rangka melaksanakan transparansi informasi.

### **Penerapan prinsip transparansi oleh PT Antam.**

Berikut merupakan beberapa contoh penerapan prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance oleh PT ANTAM:

- a. ANTAM telah membentuk Divisi Manajemen Rantai Pasokan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proses pengadaan. Secara teratur, kinerja Divisi Manajemen Rantai Pasokan juga akan dievaluasi oleh Direksi untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak melampaui kewenangan.
- b. ANTAM mengimplementasikan Whistleblowing System, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan. Jika pihak internal maupun eksternal perusahaan mengetahui, menyaksikan, atau menemukan indikasi kecurangan, pelanggaran, atau fraud yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial, mereka diwajibkan untuk melaporkannya. Implementasi ini menjadi elemen penting bagi ANTAM untuk mempertahankan dan meningkatkan transparansi perusahaan serta memerangi praktik-praktik yang dapat merusak operasional dan reputasi perusahaan.
- c. ANTAM menyediakan keterbukaan informasi kepada publik melalui berbagai media, seperti Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik (IDX dan OJK), ASX Online, situs web perusahaan, media massa, dan lain-lain. ANTAM secara terbuka mengungkapkan laporan keuangan, termasuk pendapatan, laba, dan arus kas. Informasi ini disampaikan secara tertulis maupun melalui publikasi daring.
- d. ANTAM juga memberikan keterbukaan tentang dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan, seperti penggunaan air, emisi gas, atau dampak pada keanekaragaman hayati.

## **2. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri BUMN No. 117/2002, mengacu pada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ setiap pengelola perusahaan secara efektif. Organ perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Mereka harus menjalankan tugas pengelolaan perusahaan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui kejelasan fungsi dan kewenangan setiap organ, yang diatur oleh UU PT, UU BUMN, PP Persero, dan KepMen BUMN No. 117/2002. Prinsip ini memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan operasinya secara transparan, termasuk menetapkan jobdesk dan tanggung jawab kepada seluruh bagian organisasi dan karyawan sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi perusahaan, serta memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan peran mereka dalam penerapan GCG. Prinsip ini juga menyediakan kepastian dalam pengelolaan perusahaan melalui sistem pengendalian internal yang efektif, serta sistem reward and punishment dan ukuran kinerja yang konsisten dengan tujuan perusahaan.

### **Penerapan prinsip akuntabilitas oleh PT Antam.**

Berikut merupakan beberapa contoh penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Good Corporate Governance oleh PT ANTAM:

- a. Pengembangan Sistem Manajemen Unjuk Kerja (SMUK) yang membantu pegawai mencapai target sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing.
- b. Memberikan peran dan tanggung jawab kepada divisi internal audit untuk merancang kebijakan, strategi, dan program Audit Internal guna memastikan sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik dan membantu membangun akuntabilitas manajemen yang memadai.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris setiap tahun, dengan hasil yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Memantau efektivitas implementasi Good Corporate Governance sebagai bagian dari Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2022.
- e. Mengatur secara rinci hak, wewenang, dan tanggung jawab pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang dapat diakses melalui situs ANTAM.

### **3. Prinsip Tanggung jawab**

Prinsip Tanggung Jawab, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002, menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ perusahaan wajib mematuhi prinsip kehati-hatian, anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial, yang mencakup kepedulian terhadap masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.

#### **Penerapan prinsip Tanggung jawab oleh PT Antam**

Berikut merupakan beberapa contoh penerapan prinsip Tanggung jawab dalam Good Corporate Governance oleh PT ANTAM:

- a. ANTAM berkomitmen untuk mengelola sumber daya mineral secara berkelanjutan melalui penerapan praktik pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.
- b. Masterplan CSR ANTAM 2020–2024 disusun berdasarkan Permen BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yang telah diperbarui menjadi Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- c. ANTAM memiliki Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mencapai misi perusahaan yang sesuai dengan target pencapaian yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Program TJSL ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021.
- d. ANTAM membantu masyarakat sekitar dengan memulihkan kondisi lingkungan, habitat flora dan fauna, serta produktivitas di wilayah pascatambang, sehingga tetap memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar.

- e. ANTAM telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 6.82 miliar untuk program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Rp 6.82 miliar untuk program di luar PUMK sepanjang tahun 2022.
- f. ANTAM melanjutkan upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2022 dengan menerapkan roadmap dekarbonisasi perusahaan, sebagai bagian dari komitmen ANTAM terhadap operasi yang berkelanjutan

#### 4. Prinsip Independen

Menurut Dewan Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG), prinsip-prinsip independensi memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan bertindak secara independen dan tidak memihak serta memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAPI) juga menyatakan bahwa prinsip tersebut memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan bertindak independen dan tidak memihak serta memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan ini, ada pula ketentuan hukum yang berlaku dalam prinsip independensi GCG adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 mengatur bahwa setiap perseroan terbatas wajib membentuk Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi.
- b. Pasal 30 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 30(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menekankan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan independen terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan.
- c. Pasal 11 Keputusan Ketua Dewan Komisaris PT Aneka Tambang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris ANTAM harus memiliki integritas yang tinggi, independen, dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan.
- d. Prinsip Independensi dalam Good Corporate Governance (GCG) menitikberatkan pada keberadaan Dewan Komisaris atau Komite yang tidak memiliki kepentingan yang saling bertentangan dengan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara netral. Dalam ruang lingkup PT. Antam independensi ini dapat menjamin adilnya proses pengambilan keputusan serta pengawasan yang efektif terhadap kinerja perusahaan. Struktur pengawasan yang bersifat independen dapat meningkatkan manajemen risiko, menghindari konflik kepentingan, dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.
- e. Implementasi prinsip independensi memiliki beragam pendekatan yang dapat diterapkan, di antaranya: a) Merancang kebijakan serta prosedur yang mendukung penerapan prinsip tersebut; b) Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada semua anggota karyawan tentang prinsip independensi.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan prinsip independensi.
- g. Penunjukan komisaris independen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi.
- h. Pembentukan kebijakan anti-korupsi dan kolusi untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan.
- i. Evaluasi kinerja karyawan dengan cara yang objektif dan tanpa diskriminasi.

**Penerapan prinsip independensi oleh PT Antam merupakan bukti konkret dalam pengelolaan perusahaannya. Di antaranya:**

- 1) PT Antam membentuk dewan komisaris dengan jumlah 10 anggota, di mana 2 di antaranya adalah komisaris independen. Hal ini dilakukan sebagai pengambilan keputusan strategis untuk menghindari konflik kepentingan. Sebagai contoh, Dewan Komisaris Antam terdiri dari anggota independen, berjiwa profesionalitas yang memiliki pengalaman luas di industri pertambangan, namun tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan perusahaan yang bisa memengaruhi objektivitasnya. Dalam kapasitasnya sebagai anggota independen, pihak terkait dapat mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan pandangan kritis terhadap keputusan-keputusan strategis dan operasional perusahaan.
- 2) Perusahaan telah merumuskan kebijakan anti-korupsi dan kolusi yang mengatur larangan bagi karyawan untuk terlibat dalam praktek korupsi dan kolusi. Dengan mengedepankan praktik bisnis yang etis dan berintegritas tinggi. Seperti halnya, menerapkan kode etik yang berlaku bagi semua anggota karyawan dan mitra bisnisnya. Kode ini memberikan dorongan agar mereka bertindak dengan integritas yang tinggi, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi. Prinsip etika perusahaan yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam membangun reputasi yang positif bagi perusahaan serta menjaga kepercayaan dari semua pihak yang berkepentingan. Etika yang kuat di semua strata organisasi berperan dalam membentuk budaya perusahaan yang sehat, dan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perusahaan ini memiliki sebuah Komite Audit yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta penilaian terhadap aktivitas keuangan dan audit internal perusahaan. Perusahaan secara rutin melakukan audit internal untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem pengendalian internal serta untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul. Dalam implementasinya Antam juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang tangguh guna memastikan ketaatan terhadap kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efisien merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja Persero. Dewan Komisaris atau Komite terkait harus memenuhi standar independensi dan memiliki kapabilitas untuk melakukan pengawasan yang tidak berat sebelah terhadap aktivitas operasional. Implementasi prinsip independensi oleh PT Antam memiliki dampak positif bagi perusahaan, seperti halnya, meningkatkan kepercayaan dari pihak stakeholder, meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen perusahaan dan meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Persero tidak sekadar menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan, melainkan juga menjadi strategi bisnis yang strategis. Dengan konsistensi dan efektivitas dalam mengadopsi prinsip-prinsip GCG, Persero mampu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, merangsang inovasi, meningkatkan performa, menarik minat investasi, serta mempertahankan kepercayaan dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Di tengah arus globalisasi dan evolusi teknologi yang pesat, Persero dituntut untuk senantiasa beradaptasi dan meneguhkan komitmen yang kokoh terhadap prinsip-prinsip GCG sebagai landasan kesuksesan jangka panjang.

## 5. Prinsip Kesetaraan atau Kewajaran

Prinsip Kesetaraan atau kewajaran dalam Good Corporate Governance (GCG) menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan, tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak mana pun, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Ini mencakup semua jenis diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), prinsip kesetaraan dalam GCG melibatkan perlakuan adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan. Hal ini termasuk karyawan, pemilik saham, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Dalam regulasi hukum seperti Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015, ditekankan pentingnya kesetaraan atau kewajaran dalam GCG, dengan menekankan perlunya perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi dalam semua aspek pengelolaan perusahaan. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, kebijakan perusahaan harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi, dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Contoh penerapan prinsip ini meliputi kebijakan anti diskriminasi, evaluasi kinerja karyawan yang obyektif, serta memberikan kesempatan yang setara dalam kemajuan karir tanpa memandang faktor seperti gender, ras, agama, atau status sosial. Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dapat memberikan manfaat seperti peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, peningkatan produktivitas karyawan yang merasa diperlakukan secara adil, dan peningkatan daya saing perusahaan di mata karyawan dan investor.

### **Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, PT Aneka Tambang (ANTAM) memiliki sejumlah langkah strategis yang digunakan.**

Antam menerapkan kebijakan kesetaraan atau kewajaran dalam hal kompensasi dan fasilitas bagi para karyawan yang didasarkan pada kualifikasi, tanggung jawab, dan kontribusi yang diberikan. Antam juga memiliki kebijakan anti-diskriminasi yang melarang diskriminasi dalam proses pengambilan keputusan dan promosi, berdasarkan kriteria seperti ras, suku, agama, gender, atau status sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama dalam pengembangan karier dan promosi, terlepas dari latar belakang pribadi atau sosial mereka. Salah satu contoh konkret dari implementasi prinsip ini adalah kebijakan anti diskriminasi gender yang mengatur aspek rekrutmen, promosi, dan kompensasi. Kebijakan ini memastikan kesetaraan peluang bagi karyawan perempuan, termasuk berbagai fasilitas seperti ruang menyusui, serta program pengembangan karier yang terbuka bagi semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin.

Selain itu, Antam juga menjamin tidak adanya ketimpangan yang tidak adil dalam kebijakan penggajian, khususnya bagi karyawan dengan tingkat keterampilan, tanggung jawab, dan pengetahuan serupa. Misalnya, kebijakan tersebut memastikan bahwa setiap karyawan memiliki hak yang setara dalam mendapatkan kompensasi yang adil. Contohnya, kebijakan penggajian di Antam memperhitungkan level atau posisi pekerjaan, peningkatan gaji berdasarkan evaluasi kinerja, dan pemberian tunjangan yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan karyawan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kesetaraan dalam



kompensasi di seluruh lini karyawan. Selanjutnya, Antam memiliki sistem penilaian kinerja yang obyektif dan tanpa diskriminasi. Sistem ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti aspek pribadi atau latar belakang tertentu.

Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan ini melibatkan berbagai strategi, antara lain: pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai nilai-nilai yang tercantum, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung implementasi prinsip tersebut. PT Antam telah menerapkan prinsip ini dalam evaluasi kinerja karyawan yang jelas dan obyektif. Antam telah berhasil menerapkan prinsip prinsip ini dengan memberikan manfaat seperti peningkatan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan daya saing perusahaan. Selain itu, proses evaluasi tersebut terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.

## **2. Transparansi Informasi dan Akuntabilitas dalam Praktik Good Corporate Governance (GCG) Mempengaruhi Kinerja PT Antam**

Dalam aspek manajemen korporasi kontemporer, konsep transparansi dapat diartikan sebagai diseminasi informasi yang komprehensif terkait proses pengambilan keputusan dan penyampaian data yang relevan mengenai entitas bisnis. Implementasi transparansi yang efektif diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat, kredibel, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Fenomena ini berpotensi menghasilkan dampak positif yang substansial terhadap kinerja non-finansial perusahaan (Ningsih & Daniel Bagana, 2022). Ketika suatu entitas bisnis mampu mempresentasikan informasi secara terbuka dan tanpa distorsi, hal ini dapat memperkuat relasi fiduisari dengan para pemegang saham, sekaligus meningkatkan performa non-finansial perusahaan. Dengan demikian, eksekusi transparansi yang optimal memiliki potensi untuk memberikan efek katalis terhadap kinerja non-finansial korporasi. Sebaliknya, implementasi yang tidak adekuat dari prinsip transparansi dapat mengakibatkan degradasi kinerja non-finansial yang signifikan.

Akuntabilitas, dalam hal ini, merujuk pada tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai aspek internal, memastikan bahwa kinerja non-finansial dapat dieksekusi dengan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh entitas korporasi. Kemampuan suatu perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dan mendukung inisiatifnya menjadi faktor krusial agar operasional perusahaan dapat berjalan selaras dengan objektif yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan performa non-finansial (Ningsih & Daniel Bagana, 2022). Prinsip akuntabilitas berfungsi sebagai direktif bagi perusahaan dalam memenuhi obligasi, peran, dan tanggung jawabnya dalam mengelola bisnis serta menyajikan laporan kinerja secara transparan kepada para pemegang saham. Teori agensi mengidentifikasi adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham akibat asimetri informasi. Oleh karena itu, entitas bisnis harus mampu mempertanggungjawabkan dan mendukung upayanya agar tetap beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi prinsip akuntabilitas berperan dalam mencegah penyalahgunaan otoritas oleh pihak-pihak yang tidak relevan. Perusahaan yang dikelola dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan kepentingan stakeholders dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, meningkatkan performa non-finansial, serta memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Banyak entitas korporasi mengadopsi praktik Good Corporate Governance (GCG) dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan, yang menjadi elemen vital dalam optimalisasi performa finansial. Sebuah ilustrasi empiris dapat ditemukan

dalam sektor ekstraktif, di mana korporasi seperti PT. Antam Tbk berhasil memperoleh penghargaan dalam ajang Good Corporate Governance 2018 berkat implementasi GCG yang optimal (Muntahanah & Murdijaningsih, 2020).



**Gambar 1. Hasil buku Laporan Tahunan Antam (2020)**

Dalam paradigma manajemen korporasi kontemporer, PT Antam mendemonstrasikan dedikasi yang signifikan terhadap penciptaan nilai yang substansial bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Strategi ini diimplementasikan melalui serangkaian inisiatif yang meliputi optimalisasi keunggulan operasional, peningkatan daya kompetitif, serta utilisasi sumber daya yang efisien untuk meningkatkan performa korporasi. Entitas bisnis ini menaruh perhatian khusus pada dinamika kerja karyawan, mengingat modus operandi individu berkorelasi langsung dengan kinerja kolektif perusahaan. Konsekuensinya, PT Antam menginisiasi sistem perencanaan kerja yang komprehensif, di mana setiap personel, bersama dengan superior mereka, mengembangkan rencana kinerja individual yang kemudian dimanifestasikan dalam format Rencana Kinerja Individu (SMUK Plan). Rencana SMUK ini melalui proses evaluasi bertingkat, dimulai dari tinjauan oleh atasan langsung hingga penilaian oleh manajemen di setiap unit kerja. Sistem evaluasi kinerja PT Antam bersifat multidimensional, menilai keberhasilan karyawan berdasarkan dua parameter utama: Tujuan Hasil (KPI) dan Tujuan Proses (Perilaku). Penilaian kinerja dikalkulasi dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, disesuaikan dengan hierarki masing-masing karyawan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan atau kegagalan kinerja individual. Untuk memfasilitasi proses evaluasi yang transparan dan akuntabel, PT Antam mengimplementasikan Sistem Manajemen Unjuk Kerja (SMUK). Sistem ini berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan target pencapaian setiap karyawan sesuai dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab mereka. Proses penilaian kinerja dilaksanakan melalui dua modalitas: sistem elektronik yang terintegrasi dalam Human Capital Information System (HCIS) dan metode konvensional non-elektronik.

Dalam konteks yang lebih luas, transparansi informasi dan akuntabilitas dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran instrumental dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Adopsi prinsip-prinsip GCG dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai peningkatan performa perusahaan dalam perspektif jangka panjang. Rasionalisasi di balik strategi ini terletak pada kemampuan GCG untuk memperkuat pengendalian operasional, meningkatkan nilai tambah, melindungi kepentingan stakeholders,

serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Disisi lain aspek industri ekstraktif, di mana risiko operasional dan kompleksitas bisnis cenderung tinggi, transparansi informasi dan akuntabilitas terkait implementasi GCG berpotensi menghasilkan dampak positif yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya menguntungkan pemegang saham dengan menyediakan visibilitas yang lebih baik terhadap performa perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hubungan yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Damaiani (2020) menegaskan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas yang terintegrasi dalam praktik GCG bukan sekadar formalitas atau kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memiliki implikasi substantif terhadap kinerja perusahaan. Melalui penciptaan ekosistem bisnis yang transparan, jujur, dan akuntabel, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip GCG memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja PT Antam melalui berbagai mekanisme yang mempengaruhi aspek-aspek kunci perusahaan. Salah satu manifestasi utama dari pengaruh GCG terlihat dalam peningkatan profesionalisme manajemen. Secara teoretis, GCG mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang profesional, menciptakan lingkungan di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan transparansi, etika, dan pertimbangan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman resmi PT Antam, perusahaan telah melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan implementasi GCG di seluruh entitasnya. Untuk mengukur tingkat penerapan GCG, PT Antam secara konsisten melakukan evaluasi tahunan sejak 2004. Penilaian ini dilakukan oleh pihak independen dengan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh SK-16/MBU/2012 dari Kementerian BUMN, Prinsip & Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan dari ASX Corporation, ASEAN Corporate Governance Scorecard, dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan. Upaya-upaya tersebut mencakup restrukturisasi organisasi yang terencana dan efisien, perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkala sesuai dengan perkembangan aktivitas usaha, penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Unjuk Kerja untuk mendukung penilaian kinerja yang lebih objektif, serta revisi berkala terhadap kepatuhan pada Kebijakan Manajemen, Standar Prosedur Operasional (SOP), dan Instruksi Kerja (WI), terutama untuk aktivitas baru perusahaan. Perbaikan juga dilakukan pada sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko di seluruh lini usaha, serta upaya sosialisasi dan internalisasi penerapan GCG di perusahaan.

Implementasi prinsip GCG di PT Antam diproyeksikan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan. Dengan adanya kerangka kerja GCG, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih terstruktur dan akuntabel. Monitoring terhadap kinerja manajemen dapat dilakukan dengan lebih efisien, memungkinkan identifikasi dan penanganan potensi risiko atau masalah dengan cepat. Signifikansi GCG juga tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan. Studi empiris menunjukkan bahwa GCG, profitabilitas, dan leverage memiliki pengaruh yang substansial terhadap nilai perusahaan. Dengan menerapkan prinsip GCG, PT Antam berpotensi mencapai tingkat kinerja keuangan yang lebih baik, meningkatkan profitabilitas, dan mengelola leverage secara prudensial. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan.

### 3. Peran Good Corporate Governance (GCG) dalam Mempengaruhi Manajemen Risiko Pada Kinerja PT Antam

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* (GCG) sangat berperan penting dan berpengaruh pada setiap divisi manajemen dalam sebuah Perusahaan, karena dalam praktiknya *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai stabilisator yang mana memiliki tugas penting untuk menjaga agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan baik, begitu pun pada divisi manajemen risiko yang ada di PT Antam. *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran untuk membantu perusahaan agar dapat menjalankan manajemen risiko dengan efektif yang selanjutnya akan membantu perusahaan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, kemudian membantu Perusahaan untuk menemukan solusi terbaik untuk menangani risiko yang sudah terjadi, dan juga membantu Perusahaan untuk mengevaluasi sistem manajemen risikonya agar menjadi lebih baik lagi. Hal-hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir kerugian Perusahaan dan memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh Perusahaan. Dengan begitu secara langsung maupun tidak langsung *Good Corporate Governance* (GCG) melalui manajemen risiko mempengaruhi efektifitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan bisnisnya, dan juga membantu perusahaan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainability growth*). Berikut terdapat beberapa aspek yang menjadi *peran Good Corporate Governance* (GCG) dalam mempengaruhi manajemen risiko pada kinerja di PT Antam:

#### 1) Transparansi dan Akuntabilitas

Manajemen risiko dalam sebuah perusahaan, pasti selalu berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Begitupun pada PT Antam, pada aspek ini peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mempengaruhi manajemen risiko mendorong transparansi dengan mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai risiko yang dihadapi oleh PT Antam, proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi yang komprehensif, yang selanjutnya dilakukan komunikasi yang efektif dan secara transparan, kepada pemangku kepentingan. Komunikasi tersebut membahas tentang risiko, termasuk di dalamnya mengenai sifat risiko, sumber risiko, dan dampak potensialnya. Kemudian para pemangku kepentingan akan bertindak untuk mengambil keputusan, dalam proses ini transparansi diperlukan untuk mengetahui bagaimana risiko dinilai dan dikelola, hal ini penting guna meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan.

Kemudian dalam aspek akuntabilitas *Good Corporate Governance* (GCG), mempengaruhi manajemen risiko untuk menetapkan struktur yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab atas pengelolaan risiko tertentu. Baik secara individu maupun secara berkelompok (*team*). Selanjutnya *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong manajemen risiko untuk selalu mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, juga melakukan audit internal secara teratur guna mengevaluasi implementasi dari manajemen risiko perusahaan, dan memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan manajemen risiko terbaik. Kemudian *Good Corporate Governance* (GCG) juga mengarahkan agar manajemen risiko melakukan pelaporan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan. Dalam konteks manajemen risiko korporat, PT. Antam telah mendemonstrasikan pendekatan yang progresif dan terstruktur. Berdasarkan informasi yang termuat dalam laporan tahunan 2022, entitas bisnis ini telah mengembangkan suatu kerangka kerja yang disebut *Grand Design Risk Based Budgeting* (RBB).

Konsep *Risk Based Budgeting* merupakan suatu metodologi perencanaan anggaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko ke dalam proses penyusunan anggaran korporat. Implementasi *Risk Based Budgeting* oleh PT. Antam merupakan respons strategis terhadap berbagai tantangan operasional yang dihadapi perusahaan. Tantangan-tantangan ini meliputi frekuensi revisi anggaran yang tinggi pada awal atau pertengahan tahun fiskal, implementasi mitigasi risiko yang belum optimal, serta potensi disharmoni antara Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Tujuan fundamental dari implementasi *Risk Based Budgeting* adalah untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya finansial dengan mempertimbangkan spektrum risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian objektif dan target perusahaan.

Selain inisiatif *Risk Based Budgeting*, manajemen risiko PT. Antam juga telah mengadopsi Sistem Manajemen Anti Penyipuan. Dalam konteks ini, perusahaan melakukan pemetaan dan evaluasi risiko penyipuan yang komprehensif pada seluruh proses bisnisnya. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko penyipuan pada setiap tahapan proses bisnis, sehingga memungkinkan implementasi mekanisme pengendalian dan pencegahan penyipuan yang efektif. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas korporat, PT. Antam secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi personel pada divisi manajemen risiko. Salah satu inisiatif yang diimplementasikan adalah Program Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Manajemen Risiko. Program ini dirancang dengan tujuan ganda: pertama, untuk meningkatkan kapabilitas personel divisi manajemen risiko, dan kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas terkait manajemen risiko. Melalui serangkaian inisiatif ini, PT. Antam mendemonstrasikan komitmennya terhadap praktik manajemen risiko yang holistik dan terintegrasi, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan dalam lanskap bisnis yang dinamis.

## 2) Pengelolaan Konflik Kepentingan

Peran selanjutnya dari *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mempengaruhi manajemen risiko adalah mengenai pengelolaan konflik kepentingan, yaitu GCG dalam manajemen risiko membantu perusahaan untuk mengelola konflik kepentingan yang muncul dalam pengambilan keputusan terkait risiko. Tujuannya agar keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan, dari setiap pemangku kepentingan, guna mengurangi risiko konflik dan keputusan yang kurang bijak. Dalam aspek ini manajemen risiko berperan dalam mengelola konflik kepentingan melalui beberapa tahap, yaitu:

### a. Mengidentifikasi konflik kepentingan

Manajemen risiko berkewajiban untuk mengidentifikasi situasi-situasi di dalam Perusahaan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, khususnya pada saat proses pengambilan Keputusan.

### b. Penilaian risiko konflik kepentingan

Manajemen risiko melakukan penilaian terhadap konflik yang berhasil diidentifikasi, Penilaian ini mencakup dampak yang mungkin terjadi jika konflik kepentingan tidak

diatasi dan probabilitas terjadinya. Hal ini juga membantu manajemen risiko, dalam menentukan prioritas dan langkah-langkah yang perlu diambil.

- c. Pengembangan dan penegakan kebijakan
- d. Pada tahap ini manajemen risiko bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan, termasuk juga prosedur-prosedur yang jelas terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan. Kebijakan yang dimaksud mencakup aturan partisipasi dalam keputusan tertentu, pengungkapan kepentingan, atau langkah-langkah untuk mengurangi konflik yang mungkin timbul.

### 3) Pengawasan dan Evaluasi

Peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mempengaruhi manajemen risiko selanjutnya, terdapat dalam aspek pengawasan dan evaluasi. Dalam aspek pengawasan, Manajemen risiko bertanggung jawab untuk memantau lingkungan operasi dan strategis perusahaan secara konsisten dan menyeluruh. Hal ini juga termasuk memantau perubahan dalam faktor internal dan eksternal Perusahaan. Peran pengawasan yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan, sehingga perusahaan memiliki nilai lebih dimata para pemangku kepentingan terutama para investor. Di PT. Antam sendiri pengawasan menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam manajemen risiko, terutama untuk memonitor implementasi dari manajemen risiko yang sedang dijalankan.

Selanjutnya pada aspek Evaluasi, pada dasarnya evaluasi sangat dibutuhkan pada setiap divisi manajemen perusahaan, termasuk pada divisi manajemen risiko. Evaluasi mempunyai peran penting didalam manajemen risiko perusahaan, yaitu untuk meninjau sejauh mana keberhasilan dari manajemen risiko yang telah diimplementasikan oleh perusahaan, juga untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam proses implementasi, sehingga divisi manajemen risiko dapat melakukan perbaikan secepatnya.

Pada PT Antam evaluasi yang dilakukan oleh manajemen risiko terbagi menjadi evaluasi kinerja divisi manajemen risiko, dan Evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko (*Risk Maturity Level*). Evaluasi kinerja divisi manajemen risiko, yaitu evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) sedangkan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko, atau yang dikenal sebagai *Risk Maturity Level*, adalah proses pengukuran tingkat kedewasaan pengelolaan risiko. Dalam proses ini, dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan praktik terbaik dalam penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

### 4) Pemenuhan Peraturan dan Kepatuhan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), ANTAM tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkomitmen untuk menerapkannya secara menyeluruh dalam semua aspek operasional dan manajemen risiko, dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah SUPERSAFE. ANTAM mengoptimalkan pelaksanaan budaya K3 sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan produktif. ANTAM juga berkomitmen untuk mencapai zero fatality dalam operasional pertambangan, dengan memastikan keselamatan sesuai standar yang berlaku. Kesadaran akan risiko tinggi terkait keselamatan pertambangan bagi pekerja dan aset perusahaan mendorong ANTAM untuk menjalankan kebijakan K3 secara ketat. SUPERSAFE merupakan delapan prinsip utama

untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja tambang, serta operasional yang aman, efisien, dan produktif. Prinsip-prinsip ini telah distandardisasi dan disosialisasikan di seluruh unit, unit bisnis, dan proyek pertambangan ANTAM, dimana pekerja diwajibkan untuk mematuhi kebijakan tersebut. SUPERSAFE adalah singkatan dari delapan prinsip berikut:

- a. Syarat standar pekerja harus terpenuhi,
- b. Utamakan pengamanan area dan alat,
- c. Pahami bahaya dan risiko operasi tambang dan pengolahan mineral,
- d. Perhatikan prosedur tanggap darurat,
- e. Selalu gunakan izin kerja khusus,
- f. Amankan pekerjaan di atas air,
- g. Fokus pada prosedur alat dan angkut,
- h. Efektifkan manajemen perubahan.

Dalam operasionalnya, ANTAM telah menetapkan program K3 untuk mengurangi risiko bagi perusahaan dan pekerja tambang. ANTAM juga bertanggung jawab atas kesehatan para pegawai, dengan menyediakan layanan kesehatan yang meliputi pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemeliharaan kesehatan (promotif), dan pemulihan (rehabilitatif). Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan minimal sekali setahun, dan pegawai mendapatkan vaksinasi gratis untuk mencegah penyakit menular. Kegiatan check-up ini bertujuan untuk memastikan kesehatan pekerja dan mengurangi risiko, serta mewujudkan manajemen risiko yang sehat dalam konteks kepatuhan.

Sebagai perusahaan pertambangan yang mengubah bentang alam, ANTAM berfokus pada reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. ANTAM berkomitmen untuk mengembalikan kondisi lingkungan, habitat flora dan fauna, serta produktivitas area pascatambang agar tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar. ANTAM juga aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman pohon, baik sebagai bagian dari reklamasi lahan maupun manajemen pascatambang. Pada tahun 2022, ANTAM telah menanam total 167.056 pohon, terdiri dari 95.930 pohon di lahan bekas tambang dan 71.126 pohon di luar bekas tambang. ANTAM mematuhi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mewajibkan pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100 persen, serta menghadapi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

#### 5) Reputasi Perusahaan

PT ANTAM memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas, dengan ruang lingkup operasional yang terus berkembang. Dalam upaya ekspansi bisnis di bidang eksplorasi dan pemrosesan hasil tambang serta produk derivatifnya, ANTAM berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan menjaga kepercayaan para investor, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian pasar. Penerapan GCG yang efektif memungkinkan ANTAM mencapai komitmen yang telah ditetapkan. Tujuan utama penerapan GCG di ANTAM untuk menarik dan mempertahankan investor adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja ANTAM melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berhati-hati (prudent), dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengendalikan risiko, serta menghindari benturan kepentingan.

- b. Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia di ANTAM dengan penilaian kinerja yang lebih obyektif, transparan, dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem, dan tanggung jawab yang jelas.
- c. Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.
- d. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengendalian internal yang baik.
- e. Memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) ANTAM dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menjalankan hubungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Salah satu inovasi PT ANTAM untuk menambah dan menjaga kepercayaan investor adalah dengan meluncurkan aplikasi e-SCM. Aplikasi e-SCM ANTAM adalah platform daring yang memfasilitasi Mitra Kerja Penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui internet, termasuk registrasi online untuk menjadi Mitra Kerja. E-SCM terdiri dari beberapa modul yang terus diperbarui untuk mendukung perkembangan bisnis dan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku di ANTAM. Modul-modul tersebut meliputi Procurement Management (termasuk di dalamnya Proses Procurement Planning), Commodity Management, Contract Management, dan Vendor Management. ANTAM secara konsisten mengukur indeks kepuasan setiap tahun. Pada tahun 2022, survei kepuasan pemasok dilaksanakan secara online melalui sistem e-SCM pada bulan Desember. Indeks kepuasan menunjukkan bahwa 80.38% Mitra Kerja merasa puas dengan pelayanan ANTAM, meningkat dari 79.58% pada tahun 2021.

#### 6) Manajemen Risiko Terintegrasi

Berbicara mengenai integritas manajemen risiko pada PT ANEKA TAMBANG bisa kita lihat dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah terpenuhi, yang data nya ada di buku laporan tahunan PT Aneka Tambang itu sendiri berikut data datanya :

##### a. Transparansi (Transparency)

Dalam ketransparansian PT ANTAM mempunyai prinsip Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, ANTAM menyediakan Informasi material dan relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. ANTAM mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya Masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga Hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Kreditur dan Pemangku Kepentingan.

##### b. Akuntabilitas (Accountability)

ANTAM mempunyai prinsip dalam keakuntabilisan yaitu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dapat dipercaya. Untuk itu ANTAM berupaya melaksanakan pengelolaan perusahaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan Dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

##### c. Pertanggung jawaban (Responsibility)

Prinsip ANTAM dalam pertanggungjawaban ialah selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan Sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang Dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.



d. Kemandirian (Independency)

Prinsip PT Antam dalam kemandirian, ANTAM melaksanakan pengelolaan perusahaan secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan Tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran (Fairness)

Prinsipnya Dalam melaksanakan kegiatannya, ANTAM senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas Kewajaran. Telah diterapkan dan sudah terealisasinya prinsip GCG pada PT Antam, PT. Antam bisa membuktikan bahwa manajemen risiko pada perusahaannya sudah cukup terintegritas. Untuk integritas manajemen risiko ditekankan pada (*Accountability*) yang dimana manajemen risiko harus bertanggung jawab atas kebijakan yang di luncurkan untuk mengurangi risiko-risiko yang memperburuk reputasi dan kinerja perusahaan, seperti risiko- risiko terkait keselamatan pekerja tambang, transparansi dalam pengelolaan keuangan. Untuk keseluruhan pekerja pada PT. Antam telah diberikan pengetahuan berupa “Budaya Sadar Risiko” yang dimana seluruh pekerja diharapkan taat aturan dan menghindari risiko yang berkaitan dengan hukum ataupun nyawa dengan beberapa penjelasan diatas sudah cukup untuk mengetahui terintegritas nya manajemen risiko pada PT Antam itu cukup bisa mengoptimal kan kinerja Perusahaan dalam mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi secara konsisten dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di PT Aneka Tambang (ANTAM), implementasi GCG termasuk sistem pelaporan pelanggaran dan transparansi informasi keuangan terbukti memperkuat akuntabilitas perusahaan. Selain itu, komitmen ANTAM terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia juga berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar S.sos, M.si., selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan kelompok yang telah berkolaborasi dengan baik dalam proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para peneliti terdahulu yang telah mempublikasikan karya-karya mereka dan mengizinkan karya tersebut digunakan sebagai pedoman serta referensi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Wulandari, R. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatara Law Review*, 2(2), 221. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3568>
- Damaianti, I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 113–123. <https://doi.org/10.37577/ekonam.v1i2.216>
- Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus Pada PT Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 19(2), 126-137. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Irawati, Delta dan Sutarjo, A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. In *Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 2, pp. 277–288).
- Laporan Keberlanjutan PT Antam Tbk. Tahun 2022.
- Muntahanah, S., & Murdijaningsih, T. (2020). Peran Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 234–243. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1515>
- Ningsih, S. A., & Daniel Bagana, B. (2022). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan Pt Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 574.
- PT Aneka Tambang Tbk. (2023). *2022 Mencapai Hasil Terbaik dan Melampaui Ekspektasi Striving for Excellence and Go Beyond*. [www.antam.com](http://www.antam.com)
- Roosdiana. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(2), 133–141.
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol*, 4(1), 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>.
- Theofilus, P., Nurjaman, N., & Mulyadi, E. (2019). Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam Tbk. Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 14(1), 1-12.
- Sulistiyawati, E. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dengan Pendekatan Keberlanjutan Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *Jurnal Ilmiah Manajemen Kewirausahaan*, 10(1), 1-11.
- Purbaningrum, A., Budiarto, S., & Sulistiyawati, E. (2021). Penerapan Good Corporate.